

Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

Policy Brief Series

Issue 9 | Vol. 1 | 2018

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan tujuh lembaga riset.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Pemberantasan Radikalisme di Daerah Perbatasan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Institut Agama Islam Negeri Manado

Pesan-Pesan Utama

1. Program pemberdayaan sosial ekonomi untuk mencegah radikalisme di daerah perbatasan masih sangat terbatas.
2. Program pencegahan radikalisme dan terorisme masih terfokus pada penangkapan pelaku dari daerah lain dan pengawasan pemahaman ajaran agama yang dianggap menyimpang.
3. Program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan sangat penting untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah perbatasan.

Latar Belakang

Wilayah perbatasan sudah lama digunakan sebagai jalur lalu lintas oleh kelompok radikal dan teroris. Sesuai laporan kepolisian resort Sangihe, Anthony Salim pernah menggunakan jalur perbatasan pada tahun 2002 untuk menyelundupkan kader dan senjata dari dan ke Filipina. Di Nunukan, Reza Nurjamil, yang merupakan anggota kelompok *Ansharut Daulah* asal Tasikmalaya, ditangkap pada 2017 terkait aktivitasnya dengan gerakan ISIS. Di Batam, polisi menangkap belasan pelaku tindak terorisme yang berasal dari Sumatera Barat selama 2017.

Kelompok radikal dan teroris memanfaatkan situasi demografis dan geografis daerah perbatasan yang luas. Daerah perbatasan memiliki banyak jalur darat dan laut dari dan ke negara tetangga. Jalur-jalur tersebut berfungsi sebagai jalur lalu lintas orang dan barang yang sudah lama ada dan tersebar di banyak titik yang sulit diawasi secara terus menerus.

LP2M IAIN Manado melihat urgensi program sosial ekonomi dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di daerah perbatasan. Program pemberdayaan sosial ekonomi meliputi kegiatan *capacity building* dalam peningkatan keterampilan

kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan kemandirian usaha ekonomi lokal.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah membubarkan BNPP tersebut dan menetapkan bahwa pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kotamadya. Oleh karena itu, program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan memerlukan kerjasama antara pelaksana teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kotamadya dengan BNPT/FKPT di daerah perbatasan.

Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Daerah perbatasan sering memiliki persoalan sosial ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Bisnis terlarang,

perdagangan manusia, komunitas yang terisolasi, penegakan hukum yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang buruk menjadi pemandangan umum masyarakat perbatasan. Dalam kasus bisnis ilegal, penjualan senjata api dari Filipina sering terjadi di Sangihe, peredaran alat elektronik tanpa pajak dari Singapura di Batam, dan sabu-sabu dari Malaysia di Nunukan, termasuk penjualan pakaian bekas dari negara tetangga di tiga daerah perbatasan tadi. Dalam hal perdagangan manusia, keluar masuk TKI ilegal menjadi pemandangan sehari-hari di Batam dan Nunukan. Komunitas warga di kepulauan luar Sangihe dan Nunukan sangat terisolir dari pusat pemerintahan dengan minimnya transportasi dari dan ke kepulauan terluar tersebut. Dalam masalah pendidikan, belum ada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sangihe dan hanya ada satu perguruan tinggi swasta di Nunukan.

Sejak terpilih, pemerintahan Jokowi bertekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan program-program unggulan untuk memperkuat daerah dan desa, pemerintahan Jokowi-JK tampaknya akan membuka wacana baru tentang pentingnya memperkuat pemberdayaan sosial ekonomi di perbatasan. Dengan sudut pandang baru bahwa daerah perbatasan adalah halaman depan dan pintu gerbang negara, tekad membangun daerah perbatasan tampaknya akan segera terwujud.

Namun demikian, jika dilihat dari tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, kebijakan pembangunan wilayah perbatasan masih terfokus pada pembangunan infrastruktur nasional sebagai prioritas utama, bukan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan. Beberapa kegiatan peningkatan kualitas mutu produk Industri Kecil Menengah (IKM) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kotamadya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sama seperti kegiatan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas

Koperasi dan UKM. Program-program dari kementerian lain seperti kegiatan peningkatan sadar wisata oleh kementerian pariwisata, kegiatan penciptaan wirausaha baru oleh Kementerian Tenaga Kerja dan kegiatan kelompok usaha bersama oleh Kementerian Sosial. Program-program insidental juga dikembangkan seperti peremajaan pabrik pengolahan ikan di Sangihe dan pembangunan pasar di Sebatik.

Pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas di atas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM dan UKM. Pelatihan pemasaran sering diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal dan peningkatan produksi. Beberapa pelaku IKM dan UKM yang mengikuti program sering berasal dari keluarga dekat, satu daerah asal atau suku, dan seringkali penerima program adalah tim sukses para kepala daerah yang berkuasa. Poin terakhir yang juga penting, pemberdayaan ekonomi sejauh ini belum dikaitkan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme.

Partisipasi masyarakat perbatasan dalam memberikan informasi dan terlibat dalam kegiatan penanganan radikalisme dan terorisme sangat penting. Garis perbatasan yang luas perlu dijaga oleh masyarakat sekitar. Program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat perbatasan merupakan upaya memberantas radikalisme dan terorisme di daerah perbatasan.

Metodologi

Policy Brief ini didasarkan pada asesmen program pemberdayaan sosial ekonomi di daerah perbatasan, dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan selama masing-masing 20 hari di tiga daerah: (1) Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara; (2) Nunukan, Kalimantan Utara; dan (3) Batam, Kepulauan Riau.

Riset dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, mengadakan FGD dan mewawancarai pemangku kepentingan

di tiga daerah tersebut. Dalam riset juga dianalisa kebijakan dan implementasi program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui efektivitas program.

Temuan Penelitian dan Rekomendasi Kebijakan

1 Depolitisasi Program

Hasil pembangunan belum dinikmati secara merata. Diketahui luas di kalangan masyarakat daerah perbatasan bahwa program sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh dinas-dinas di bawah pimpinan kepala daerah terpilih sering diberikan kepada tim sukses kepala daerah terpilih serta masyarakat yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada pimpinan daerah terpilih pada saat kampanye di masa pemilihan.

Kepala daerah terpilih adalah kepala daerah yang dilantik oleh presiden untuk semua kalangan masyarakat, ia bukan kepala daerah kelompok tertentu saja. Karena itu ia harus bekerja untuk seluruh penduduk tanpa melihat afiliasi politiknya. Namun yang sering terjadi, kepala daerah bekerja untuk kelompoknya saja dan ini terjadi di daerah perbatasan.

Rekomendasi Kebijakan

Setiap program pemberdayaan sosial ekonomi harus ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Program harus tepat sasaran. Penyediaan alat produksi penangkapan ikan, misalnya, harus diberikan kepada masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir laut, bukan kepada masyarakat petani yang tinggal di pegunungan. Demikian sebaliknya, bantuan alat pertanian diberikan kepada petani, bukan nelayan. Setelah kesesuaian sasaran program dengan kebutuhan masyarakat penerima program dilakukan, langkah selanjutnya adalah

memetakan masyarakat dan membuat prioritas. Ini agar seluruh kelompok nelayan atau petani menerima manfaat program. Dengan cara seperti ini politisasi program dapat dihindari.

2 Keterwakilan Suku, Agama dan Kelompok

Indonesia adalah negara majemuk. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan organisasi masyarakat yang beragam. Beberapa suku besar di Indonesia adalah Jawa, Bugis, Minangkabau, Madura, Arab dan Sunda. Sementara agama besar dunia ada di hampir setiap wilayah Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Belum lagi agama lokal masyarakat setempat.

Permasalahan di daerah perbatasan ialah kondisi keragaman budaya dan agama di atas jarang menjadi pertimbangan dalam menentukan peserta program sosial ekonomi pemberdayaan masyarakat. Padahal keragaman merupakan modal utama dalam masyarakat Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

Setiap daerah harus dipetakan secara baik. Satu daerah bisa terdiri dari beberapa suku mayoritas. Beberapa daerah sangat plural dari sisi keragaman agama. Dengan semangat kesatuan agama dan budaya, pengambil kebijakan program sosial dan ekonomi pemberdayaan masyarakat harus merefleksikan keragaman tersebut dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program yang ada.

3 Penyelesaian masalah utama masyarakat

Setiap masyarakat suatu daerah memiliki masalah utama yang berbeda dari daerah lain. Masyarakat daerah perbatasan dan kepulauan, misalnya, selalu membutuhkan suplai sayur-sayuran dari daerah lain. Daerah industri punya masalah perburuhan, dan lain sebagainya.

Pemerintah diamanatkan oleh Undang-undang untuk menyejahterakan masyarakat banyak. Program pemberdayaan masyarakat akan lebih bermanfaat secara masif jika

diarahkan untuk merespon persoalan yang ada di masyarakat .

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah daerah sebenarnya banyak melakukan program pemberdayaan. Jika daerah perbatasan dan kepulauan sebagaimana disampaikan di atas memiliki persoalan dalam suplai sayur-sayuran, maka Dinas Pertanian, berkoordinasi dengan dinas lain, dapat menggunakan lahan kosong untuk penanaman jenis sayur-sayuran yang dibutuhkan. Dinas-dinas yang ada juga bisa menginisiasi pengolahan sayur hidroponik dan mengembangkannya sebagai program unggulan daerah. Ini sekedar contoh saja tentang bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan.

4 Kemandirian Peserta Program

Peserta program sosial ekonomi sering mengharapkan bantuan terus-menerus dari pelaksana program baik dari sisi pelatihan lanjutan maupun dari sisi modal. Hal ini dapat dipahami bahwa program telah gagal dalam menjalankan kegiatannya. Kurangnya kemandirian peserta program bisa terjadi karena banyak faktor seperti peserta program yang tidak serius menekuni kegiatan ekonominya, kedangkalan materi program dan lingkungan usaha yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kemandirian peserta program akan lebih mudah dicapai jika peserta program adalah masyarakat yang sudah memulai dan tekun bergelut dalam kegiatan ekonomi sebelum mengikuti program yang ada.

Rekomendasi kebijakan

Pelaksana program pemberdayaan sosial ekonomi harus melakukan seleksi peserta. Tahapan ini sangat penting untuk memilih peserta yang betul-betul serius dalam menjalani kegiatan usaha ekonomi yang ada. Hal ini untuk menghindari pelaku usaha yang hanya iseng atau coba-coba dalam mengikuti program.

Dalam bahasa lain, pelaksana program sosial ekonomi pemberdayaan masyarakat

bukan hanya sekedar menjalankan program sebagai kegiatan rutin. Program pemberdayaan harus dilakukan berdasarkan riset untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah perlu memetakan masyarakat pelaku usaha kegiatan ekonomi secara bertingkat mulai dari pemula, menengah dan atas. Pelaku usaha pemula bisa diarahkan untuk mengikuti kegiatan peningkatan produksi dan manajemen pengelolaan industri. Kelompok menengah selanjutnya difokuskan pada pengembangan *packaging* dan *labelling* dan kelompok ekonomi atas bisa fokus pada kegiatan pemasaran baik di dalam maupun luar negeri.

5 Koordinasi Program

Implementasi program sosial ekonomi pemberdayaan masyarakat sering dilakukan sebagai kegiatan tunggal yang dianggap milik satu instansi atau dinas tertentu. Hal ini menyebabkan keterbatasan instansi dan dinas dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Apalagi jika monitoring dan evaluasi dalam instansi dan dinas tersebut tidak berjalan dengan baik.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintahan terkecil seperti RT atau dusun merupakan bagian dari pemerintahan daerah, provinsi dan pusat. Keterlibatan unit pemerintahan terkecil ini dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program sangat perlu untuk dikembangkan dalam rangka memberikan informasi yang lebih detail dan luas dalam semua tahapan program.

Koordinasi program juga sangat diperlukan dengan instansi dan dinas yang berkaitan langsung dengan inti program. Program penyediaan penerangan jalan di pedesaan oleh Dinas Pertambangan, misalnya, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga, sangat perlu dikoordinasikan dengan PLN. Hal ini bertujuan bukan hanya untuk mengkoordinasikan jenis penerangan yang tepat di lokasi yang akan dipasang tetapi juga untuk mengevaluasi dan memonitor penerangan yang digunakan setelah program

pemasangan selesai dilakukan oleh dinas terkait.

6 Impersonalisasi program

Program sosial ekonomi pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan sering kali dipahami sebagai wewenang mutlak pelaksana program tanpa kontrol. Pelaksana program seolah-olah menganggap program tersebut adalah program pribadinya atau kelompoknya.

Rekomendasi Kebijakan

Dinas-dinas dan unit-unit pelaksana program harus melibatkan pihak luar dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pihak luar tersebut bisa mencakup pemerintahan daerah terkecil seperti pemerintah desa. Di samping itu, pelaksana program harus menandatangani pakta integritas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program. Pakta integritas tersebut mencakup perjanjian untuk transparan, terbuka dan kooperatif dalam melaksanakan program.

7 Orientasi Program

Program sosial ekonomi pemberdayaan masyarakat sering diorientasikan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena pendapatan daerah secara langsung bisa meningkatkan insentif bagi unsur pemerintah daerah tersebut. Namun demikian, orientasi peningkatan pendapatan daerah harus dibarengi dengan orientasi pemberdayaan masyarakat daerah. Orientasi pemberdayaan masyarakat berarti manfaat program harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan produk usaha mereka. Kalau perlu mereka bisa mengespor produk mereka ke luar negeri. Ini agar kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan meningkat. Program ini sangat beralasan karena masyarakat perbatasan bertetangga langsung atau sangat dekat dengan negara-negara tetangga.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk merealisasikan orientasi masyarakat di atas perlu dilakukan kajian-kajian mendalam di setiap daerah. Ada beberapa contoh yang bisa dilakukan dalam pandangan kami. Pemerintah Daerah Batam, misalnya, perlu menyediakan perumahan dan transportasi murah bagi masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri yang ada di daerah tersebut. Pemerintah Daerah Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia perlu memfasilitasi hubungan sosial ekonomi dengan Malaysia yang menguntungkan masyarakat. Sementara itu, di Sangihe, hal yang sama seperti di Nunukan juga bisa direkomendasikan, di mana hubungan sosial ekonomi yang menguntungkan dengan Filipina harus dikembangkan.

8 Program sosial ekonomi dan pemberantasan radikalisme

Radikalisme adalah ancaman laten di daerah perbatasan. Jalur perbatasan sudah lama dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris. Sementara program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan sangat jarang memprioritaskan mereka yang berada di jalur perbatasan. Keikutsertaan masyarakat perbatasan akan memudahkan pemerintah dalam melibatkan mereka dalam gerakan penanggulangan radikalisme.

Rekomendasi Kebijakan

Masyarakat yang berada di daerah perbatasan sangat penting dilibatkan dalam gerakan penanganan radikalisme. Mereka dapat berperan dalam pencegahan radikalisme dengan cara mengkoordinasikan program-program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Dengan kata lain, program-program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan harus dikembangkan di daerah-daerah perbatasan dan diintegrasikan dengan kegiatan pencegahan radikalisme.

Pemberian program-program pemberdayaan sosial ekonomi kepada masyarakat di daerah perbatasan akan meningkatkan

kesadaran akan peran dan fungsi negara bagi masyarakat tersebut. Hubungan saling menguntungkan antara negara dan masyarakat akan meningkatkan bukan hanya kepercayaan masyarakat terhadap negara tetapi juga dalam mencapai keadilan ekonomi di daerah perbatasan serta pencegahan radikalisme.

Di samping pemberian program-program pemberdayaan sosial ekonomi, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pencegahan radikalisme juga bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan berupa uang tunai dalam jumlah tertentu, pemberian beasiswa pendidikan, bantuan bedah rumah dan atau pemberian status pegawai pemerintah kepada warga yang membantu kegiatan pencegahan radikalisme secara langsung.

9 Pendekatan lokal dalam penanggulangan terorisme

Pencegahan radikalisme oleh aparat pemerintah lebih banyak dipengaruhi oleh strategi yang digunakan di luar negeri. Di beberapa tempat, brosur yang disebar di hotel-hotel tentang pelaku radikalisme

yang sedang dicari aparat pemerintah menggunakan bahasa Inggris. Brosur dengan bahasa Inggris ini menunjukkan bahwa brosur tersebut ditujukan kepada pihak di luar negeri, penduduk lokal tidak paham. Brosur ini juga menunjukkan kuatnya pengaruh asing dalam usaha penanggulangan radikalisme. Di samping itu, perintah tembak ditempat bagi mereka yang terkait gerakan ISIS di luar negeri juga mengindikasikan hal yang sama.

Rekomendasi Kebijakan

Pendekatan lokal dalam pencegahan gerakan radikalisme harus lebih dikedepankan. Saat ini masyarakat diharapkan untuk tahu pentingnya informasi mengenai orang yang dicurigai sebagai pelaku radikalisme. Namun ajakan untuk selidik dan waspada kepada mereka yang dicurigai sebagai pelaku radikalisme tersebut tidak cukup. Aparat pemerintah harus bisa menggunakan komunikasi bahasa lokal dengan masyarakat dan pendekatan sosial dalam pencegahan radikalisme dengan melibatkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan penyuluhan akan bahaya radikalisme secara terus menerus.



Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.
Resilient nations.